

Peran Inklusi Keuangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Rifky Sahran

Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan UNHAS
rifkysahran@gmail.com

Muhammad Yusri Zamhuri

Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan UNHAS
mzamhuri@yahoo.com

Anas Iswanto Anwar

Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan UNHAS
aianwar@fe.unhas.ac.id

Abstract

This study aimed to analyze the impact of financial inclusion and other macroeconomic variables on income inequality across 33 provinces in Indonesia from 2020 to 2023. The analytical methods employed included descriptive analysis and panel data regression. The results of the descriptive analysis indicated that income inequality in Indonesia fell within the moderate category, while financial inclusion showed a year-on-year increase, although it remained at a medium level of inclusiveness. At a significance level of 5%, the regression results revealed that financial inclusion had a negative but insignificant effect on income inequality. The macroeconomic variables that significantly influenced income inequality were inflation, which had a positive effect, and the real Provincial Minimum Wage (UMP), which had a negative effect, while economic growth had a positive but insignificant impact.

Keywords: *Financial Inclusion, Income Inequality*

A. PENDAHULUAN

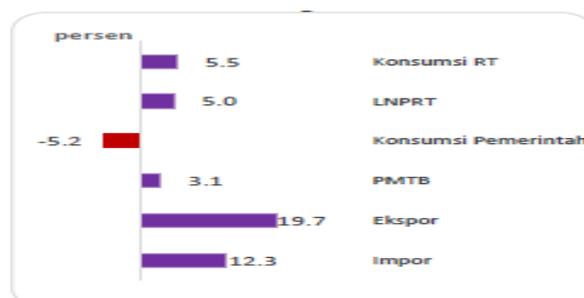
Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi di mana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak merata. Pengurangan ketimpangan menjadi salah satu target dari *Sustainable Development Goals* yang ditandatangani oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Inklusi keuangan merupakan suatu kondisi yang memastikan adanya kemudahan akan penetrasi, ketersediaan, dan penggunaan terhadap seluruh layanan keuangan formal bagi seluruh anggota dalam suatu perekonomian. Pengukuran tingkat inklusivitas keuangan pada suatu perekonomian dapat dilihat melalui sebuah indeks yang dikembangkan oleh Sarma (2012).

Penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan mengingat ketimpangan pendapatan yang terus menjadi masalah serius di Indonesia. Ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi negara. Dengan Indonesia menandatangani Sustainable Development Goals (SDGs), upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan menjadi salah satu prioritas utama. Data dari World Bank menunjukkan bahwa laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Timur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana inklusi keuangan dan variabel makroekonomi lainnya dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar 5,4 persen (YoY). Adapun alur pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Sumber: Badan Pusat Statistik. 2022)

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi pemulihan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan dan semakin menguat, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat karena pelanggaran syarat perjalanan saat momen hari raya Idul Fitri.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Sumber: Badan Pusat Statistik. 2022)

Produk Domestik Bruto riil pada triwulan II tahun 2022 mencapai Rp2.923,7 triliun. Seluruh komponen dari sisi pengeluaran, tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang masih berkontraksi. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi berdasarkan pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,5 persen (YoY), didorong oleh peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat khususnya pada momen Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, serta didukung juga oleh daya beli kelompok masyarakat yang terbantu oleh bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah. Kemudian, terjaganya inflasi juga turut membantu masyarakat dalam menjaga daya beli yang pada gilirannya menjaga dunia usaha tetap kondusif. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dasar teori yang mendasari penelitian ini adalah teori inklusi keuangan dan teori ketimpangan pendapatan. Teori inklusi keuangan menekankan pentingnya akses terhadap layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Dalam konteks ini, inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan pendapatan. Sementara itu, teori ketimpangan pendapatan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk mengkritisi dan mendukung teori-teori ini dengan data empiris yang relevan dari 33 provinsi di Indonesia.

Riset terdahulu telah menunjukkan hubungan antara inklusi keuangan dan pengurangan ketimpangan pendapatan, namun sering kali terbatas pada satu aspek inklusi keuangan atau menggunakan data yang tidak komprehensif. Beberapa studi sebelumnya juga tidak mempertimbangkan variabel makroekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang lebih holistik.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan analisis inklusi keuangan dengan variabel makroekonomi lainnya, seperti inflasi, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi, untuk mengevaluasi dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data dari 2020 hingga 2023, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di berbagai provinsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

B. METODOLOGI

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif pada penelitian ini disajikan menggunakan grafik dan peta tematik dengan tujuan untuk menggambarkan secara umum ketimpangan pendapatan, Indeks Inklusi Keuangan (IIK) dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2022.

Penghitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) menggunakan teknik pengukuran indeks yang dibangun oleh Sarma (2012) dan melibatkan tiga dimensi yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Dimensi penetrasi perbankan dalam penelitian ini menggunakan indikator jumlah rekening deposit per 1.000 penduduk dewasa, sedangkan dimensi ketersediaan layanan perbankan yang didekati lewat jumlah kantor cabang perbankan dan jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa. Sementara itu, dimensi penggunaan disusun berdasarkan indikator proporsi volume kredit untuk sektor swasta dan proporsi deposit yang dimobilisasi dari sektor swasta terhadap total PDRB. Sebelum menghitung indeks inklusi keuangan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung indeks untuk masing-masing dimensi dengan persamaan sebagai berikut:

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i} \quad ; i = 1,2,3$$

dimana :

d_i : indeks untuk dimensi ke-i

w_i : bobot untuk dimensi ke-i

A_i : nilai sebenarnya untuk dimensi ke-i

m_i : nilai batas bawah untuk dimensi ke-i

M_i : nilai batas atas untuk dimensi ke-i

Persamaan (1) akan menghasilkan indeks dimensi yang bernilai $0 \leq d_i \leq w_i$, yang memiliki makna semakin tinggi nilai d_i maka semakin tinggi juga perolehan indeks dari dimensi i. Ketika tiga dimensi inklusi keuangan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini, maka pencapaian suatu wilayah akan diwakili oleh titik $X = (d_1, d_2, d_3)$ pada ruang tiga dimensi. Dalam ruang tiga dimensi, titik $O = (0, 0, 0)$ mewakili titik yang menunjukkan kondisi di mana pencapaian inklusi keuangan yang paling rendah, sementara titik $W = (w_1, w_2, w_3)$ mewakili situasi ideal yang menunjukkan pencapaian tertinggi di semua dimensi.

Jarak titik X, O dan W harus diperhitungkan karena merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah. Jarak yang lebih besar antara X dan O akan menunjukkan inklusi keuangan yang lebih tinggi dan jarak yang lebih kecil antara X dan W akan menunjukkan inklusi keuangan yang lebih tinggi. IIK didapatkan dari menghitung nilai X1 (jarak antara X dan O) dan X2 (jarak *invers* antara X dan W). Kedua jarak ini dinormalisasi oleh jarak antara O dan W untuk membuat nilai berada antara 0 dan 1, kemudian mengambil rata-rata sederhana X1 dan X2. Rumus yang tepat diberikan di bawah ini :

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

$$IIK = \frac{1}{2} [X_1 + X_2]$$

Rumus (2) untuk X1 menunjukkan jarak Euclidean yang dinormalisasikan antara observasi dan titik O. Normalisasi dilakukan untuk membuat nilai X1 terletak antara 0 dan 1. Nilai X1 yang lebih tinggi berarti suatu wilayah memiliki inklusi keuangan yang lebih tinggi. Rumus (3) untuk X2 menunjukkan nilai invers jarak Euclidean yang dinormalisasi antara observasi dan titik W. Normalisasi dilakukan untuk membuat nilai X2 terletak antara 0 dan 1, sehingga nilai X2 yang lebih tinggi menunjukkan inklusi keuangan yang lebih tinggi.

Rumus IIK (4) adalah rata-rata sederhana X1 dan X2, sehingga menggabungkan jarak dari titik O dan titik W. IIK pada suatu waktu berada pada rentang nilai 0 sampai 1, di mana apabila IIK semakin mendekati nilai 1 maka bermakna bahwa suatu wilayah memiliki inklusi keuangan yang lebih tinggi dibanding pada waktu lainnya. Terdapat tiga kategori IIK yaitu nilai IIK kurang dari 0,3 sebagai IIK rendah, nilai IIK antara 0,3 sampai 0,6 termasuk dalam IIK menengah, dan nilai IIK antara 0,6 hingga 1 sebagai IIK tinggi.

Dalam penelitian ini, setiap dimensi akan memiliki nilai sesuai range atas masing masing pembobotannya, yaitu penetrasi perbankan ($0 < d_1 \leq 1$), ketersediaan layanan perbankan ($0 \leq d_2 \leq 0,5$), dan penggunaan jasa perbankan ($0 \leq d_3 \leq 0,5$). Namun, untuk dimensi ketersediaan layanan perbankan yang disusun dari dua indeks maka pembobotan yang digunakan adalah rata-rata tertimbang dari dua indeks yaitu $\frac{2}{3}$ bobot untuk indeks cabang bank dan $\frac{1}{3}$ bobot untuk indeks ATM. Selain menentukan bobot, untuk menghitung indeks setiap dimensi inklusi keuangan memerlukan

batas atas dan batas bawah dari setiap indikator. Batas bawah (mi) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0. Sedangkan untuk menentukan batas atas (Mi) setiap indikator, ditentukan oleh nilai maksimum yang tergantung dari sebaran masing-masing indikator.

Analisis inferensia digunakan untuk melihat pengaruh inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan UMP riil terhadap ketimpangan pendapatan pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2012-2022. Analisis inferensia yang digunakan adalah analisis data panel, yang melalui tahap pemilihan model terbaik, penetapan estimasi yang digunakan pada model terpilih melalui pengujian struktur varians kovarians residual, dan pengujian asumsi sesuai metode estimasi yang digunakan serta menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Ketimpangan Pendapatan

Rata-rata koefisien Gini Indonesia pada tahun 2020-2022 adalah 0,404, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di negara ini berada dalam kategori sedang menurut klasifikasi Todaro (2003). Meskipun angka ini mencerminkan kondisi ketimpangan yang moderat secara nasional, analisis lebih mendalam pada tingkat provinsi menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam distribusi pendapatan.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa seluruh provinsi di Pulau Papua dan Jawa mengalami ketimpangan pendapatan dalam kategori sedang. Di Papua, ketimpangan ini diperparah oleh adanya jurang yang besar antara penduduk yang terlibat dalam industri modern, seperti sektor tambang yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport, dan masyarakat tradisional yang masih bergantung pada cara hidup yang sangat konvensional. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam pendapatan dan akses terhadap sumber daya, sehingga memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi negara, proporsi penduduk kelas atas yang tinggi menyebabkan tingginya nilai koefisien Gini. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada urbanisasi menciptakan kelas menengah atas yang memiliki daya beli tinggi, terintegrasi dengan masyarakat konsumen global. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota-kota besar ini tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah, yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok dalam pengeluaran dan kualitas hidup.

Hasil analisis tersebut sejalan dengan teori ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Piketty (2014), yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sering kali menghasilkan ketimpangan yang semakin besar. Piketty berargumen bahwa pertumbuhan yang didorong oleh kepemilikan aset dan modal cenderung menguntungkan kelompok kaya, sementara kelompok miskin tetap tertinggal. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang pesat di DKI Jakarta tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah, menciptakan ketimpangan yang semakin lebar.

Penelitian oleh Ravallion dan Chen (2003) juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi jika tidak ada kebijakan redistributif yang efektif. Meski pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program sosial dan inklusi keuangan, hasilnya masih belum optimal. Ketidakmerataan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor yang memperburuk ketimpangan pendapatan.

Di sisi lain, studi oleh Klasen (2010) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, ketimpangan di Papua dan Jawa dapat dilihat sebagai faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Analisis mendalam terhadap data menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Papua dan Jawa tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Di Papua, ketimpangan antara masyarakat modern dan tradisional menciptakan dinamika yang kompleks, di mana akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sangat terbatas bagi masyarakat tradisional. Hal ini berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit diputus. Penelitian oleh BPS (2021) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua masih tinggi, dengan banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan dasar.

Sementara itu, di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, konsumerisme yang tinggi di kalangan kelas menengah atas menciptakan tekanan terhadap kelompok masyarakat yang lebih miskin. Penelitian oleh Suryadarma dan Sumarto (2003) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di perkotaan dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, dengan kelompok kaya semakin kaya dan kelompok miskin semakin terpinggirkan.

2. *Inklusi Keuangan*

Hasil analisis data menunjukkan tren positif dari inklusi keuangan di Indonesia antara tahun 2012 hingga 2022, di mana Indeks Inklusi Keuangan (IIK) meningkat dari 0,371 pada tahun 2012 menjadi 0,445 pada tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan yang konsisten, tingkat inklusi keuangan Indonesia masih tergolong dalam kategori menengah menurut pengkategorian IIK yang diusulkan oleh Sarma (2012). Dalam kategori ini, nilai IIK antara 0,3 hingga 0,6 menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih tinggi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa distribusi nilai IIK di tingkat provinsi bervariasi, dengan hanya enam provinsi—DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, DIY, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara—yang memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi. Sebaliknya, terdapat 16 provinsi dengan tingkat inklusivitas menengah dan 10 provinsi dengan tingkat inklusivitas rendah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap layanan keuangan di berbagai wilayah di Indonesia.

DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan tingkat inklusi tertinggi, memiliki rata-rata nilai IIK sebesar 0,979. Keberhasilan DKI Jakarta dalam mencapai tingkat inklusi yang tinggi dapat dikaitkan dengan posisinya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia. Tingginya penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan jasa perbankan di Jakarta sangat mendukung pertumbuhan inklusi keuangan. Menurut data BPS, jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Usaha Menengah dan Besar (UMB) di Jakarta mencapai lebih dari 1,2 juta unit pada tahun 2022, yang membutuhkan akses ke modal melalui kredit perbankan.

Sebaliknya, Sulawesi Barat mencatatkan nilai IIK terendah, yaitu 0,153. Rendahnya inklusi keuangan di provinsi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk hambatan geografis yang mengakibatkan tingginya biaya pendirian kantor cabang perbankan. Selain itu, persyaratan yang ketat, proses yang kompleks, dan formalitas yang tinggi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan. Menurut Bank Indonesia (2020), banyak masyarakat di daerah ini yang terpaksa tidak dapat mengakses perbankan, yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam distribusi layanan keuangan.

Hasil analisis tersebut sejalan dengan teori inklusi keuangan yang dikemukakan oleh Demirgüç-Kunt dan Klapper (2012), yang menyatakan bahwa akses ke layanan keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Penelitian mereka menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat inklusi keuangan yang lebih

baik. Ini terbukti di DKI Jakarta, di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat berkontribusi pada tingginya akses ke layanan keuangan.

Sebaliknya, penelitian oleh Aghion et al. (2010) menunjukkan bahwa ketidakmerataan dalam akses ke layanan keuangan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Sulawesi Barat, rendahnya inklusi keuangan dapat mengakibatkan masyarakat yang terpinggirkan semakin sulit untuk mendapatkan akses ke modal dan layanan keuangan yang esensial, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari tahapan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh model akhir yang diperoleh dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* dengan metode estimasi *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) atau *Seemingly Unrelated Regression* (SUR). Agar model yang diperoleh dapat memberikan estimasi yang *unbiased*, maka perlu dilakukan pengujian asumsi. Dalam penelitian ini model yang diperoleh memenuhi asumsi nonnormalitas dan non multikolinearitas.

1. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Persamaan (5) menunjukkan bahwa variabel Indeks Inklusi Keuangan (IIK) tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Inklusi Keuangan (IIK) tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Penjelasan ini dapat diperkuat dengan beberapa analisis dan penelitian sebelumnya:

a. Dimensi penetrasi atau kepemilikan rekening masyarakat miskin rendah

Penelitian Gabriella dan Goeltom (2013) mencatat bahwa perkembangan sektor keuangan di Indonesia belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Data Global Findex (2022) menunjukkan kesenjangan signifikan dalam kepemilikan rekening antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016, inklusi keuangan seharusnya menjadi prioritas untuk meningkatkan akses bagi masyarakat berpendapatan rendah, tetapi kenyataannya manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan.

b. Dimensi ketersediaan di Indonesia terkonsentrasi di Jawa maupun daerah perkotaan, padahal penduduk miskin banyak di perdesaan

Penyebab selanjutnya adalah dimensi ketersediaan di Indonesia mengenai layanan perbankan yang masih terbatas di perkotaan, sehingga inklusivitas keuangan belum secara maksimal dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ang (2010) yang menyatakan bahwa pengembangan keuangan di India dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsentrasi layanan perbankan di daerah perkotaan, terutama di Pulau Jawa, menghambat akses bagi masyarakat di daerah perdesaan. Data OJK (2022) menunjukkan bahwa 65% ATM dan 51% kantor cabang berada di pulau Jawa, sedangkan 52% penduduk Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Penelitian Ang (2010) menekankan bahwa distribusi layanan keuangan yang merata dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, tetapi kondisi di Indonesia menunjukkan sebaliknya.

c. Tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah

Alasan selanjutnya adalah meskipun inklusi keuangan meningkat tiap tahunnya namun tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, sehingga membuat masyarakat masih belum sepenuhnya paham terhadap layanan keuangan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Carpena, dkk (2011) menemukan bahwa literasi keuangan mempengaruhi kesadaran dan sikap seseorang terhadap produk keuangan dan penggunaan berbagai instrumen perencanaan keuangan yang tersedia. Rendahnya literasi keuangan berkontribusi pada ketidakmampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan. Menurut OJK (2022), literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya mencapai 29,66%. Penelitian Carpena dkk. (2011) menunjukkan bahwa literasi keuangan berhubungan erat dengan kesadaran dan penggunaan produk keuangan. Dengan tingkat literasi yang rendah, masyarakat tidak dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan optimal.

d. Bunga kredit perbankan di Indonesia tinggi

Alasan terakhir adalah masih besarnya tingkat suku bunga kredit di Indonesia. Kurniadi (2022) menyatakan bahwa perubahan suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal tersebut karena kenaikan suku bunga kredit akan memicu peningkatan *cost of capital* yang merugikan pihak peminjam. Akibatnya preferensi masyarakat untuk meminjam dana ke bank, terutama yang berpendapatan rendah menjadi turun karena harus membayar bunga yang lebih tinggi. Tingginya suku bunga kredit di Indonesia menjadi hambatan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses pembiayaan. Menurut Kurniadi (2022), suku bunga kredit yang tinggi meningkatkan biaya modal dan mengurangi minat masyarakat untuk

meminjam. Data dari World Bank menunjukkan bahwa suku bunga kredit di Indonesia mencapai 11%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini semakin memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia.

e. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Persamaan (5) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun tidak signifikan, terdapat informasi yang dapat dijelaskan terkait hasil tersebut. Menurut Shahbaz, dkk (2007) alasan dari pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan adalah pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sering kali tidak merata dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas. Data BPS (2018) menunjukkan bahwa kelompok menengah mengalami pertumbuhan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kelompok bawah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengurangi ketimpangan, dan keuntungan dari pertumbuhan tersebut tidak menjangkau kelompok berpendapatan rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keuntungan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya bukan dinikmati kelompok bawah, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin melebar.

f. Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan riil sebagian tenaga kerja. Hal ini menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat yang akan semakin berkurang. Inflasi dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di berbagai negara yang menunjukkan bahwa inflasi memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Temuan Albanesi (2002) yang merupakan profesor ekonomi dari *Columbia University* mendapati bahwa negara-negara dengan inflasi tinggi cenderung memiliki distribusi pendapatan yang timpang di 51 negara industri dan berkembang. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Albanesi (2002) menunjukkan bahwa inflasi tinggi cenderung memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, akan menurun. Dengan demikian, inflasi dapat memperburuk kondisi ekonomi kelompok yang sudah rentan, dan hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di berbagai negara yang menunjukkan dampak negatif inflasi terhadap distribusi pendapatan. Dengan inflasi yang tinggi

mengakibatkan menurunnya daya beli sehingga mengakibatkan kelompok miskin menjadi semakin miskin.

g. Pengaruh Upah Minimum Provinsi riil (UMP riil) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa UMP riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Lee (1999) dan Autor dkk. (2020) menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan bagi pekerja berupah rendah dan membantu menurunkan ketimpangan pendapatan. UMP sebagai kebijakan publik yang penting berpotensi mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sehingga menjadi instrumen yang strategis dalam upaya pemerataan pendapatan. Sejalan dengan beberapa penelitian yang juga menemukan bahwa peningkatan upah minimum dapat juga meningkatkan pendapatan bagi jutaan pekerja berupah rendah, sehingga menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan. Selain itu, Blundell, dkk (2018) menemukan bahwa penurunan upah riil terutama bagi mereka yang berpendidikan tinggi selama pasca resesi di UK mampu mengurangi pendapatan bersih dari kelas teratas di Inggris, sehingga mampu menekan ketimpangan pendapatan yang ada. Oleh sebab itu, UMP telah dianggap sebagai hal penting dari kebijakan publik dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

C. KESIMPULAN

Ketimpangan pendapatan di Indonesia termasuk dalam kategori sedang, sedangkan inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun indeks inklusi keuangan Indonesia tergolong dalam tingkat inklusivitas menengah. Dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa inklusi keangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sementara itu, variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia yaitu inflasi berpengaruh positif dan UMP riil berpengaruh negatif, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan.

REFERENSI

- Ang JB. (2010). *Finance and Inequality: The Case of India*. *Shouthern Economic Journal*. 76(3):738-761
- Albanesi, Stefania. (2002). *Inflation and Inequality*. *Centre for Economic Policy Research (CEPR) Discussion Paper No. 3470*. UK : London
- Autor, David H., Alan M, and Christopher L. Smith. (2020). *The Contribution of the Minimum Wage to U.S. Wage Inequality over Three Decades: A Reassessment*. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 16533*.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Perhitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2022*. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia (Triwulan II Tahun 2022) Edisi Vol.6, No.2 Agustus 2022*. Kedupatian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas
- Bank Indonesia. (2020). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: BI
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta : BI
- Beck, T., Ross, A. D., & Levine, R. (2007). *Finance, Inequality and The Poor*. *Journal of Economic Growth*, 12(March), 27–49.
- Blundell, Richard., Robert J., Agnes N. K., dan James P. Ziliak. (2018). *Income Inequality and The Labour Market in Britain and the US*. *Journal of Public Economics*, 162 h. 48–62
- Bosch, Mariano, and Marco Manacorda. (2010). *Minimum Wages and Earnings Inequality in Urban Mexico*. *American Economic Journal: Applied Economics* 2 (4):128-49. doi: 10.2307/25760235
- Gabriella, L. G., dan Goeltom, M. S. (2013). *Pengaruh Pembangunan Keuangan Perbankan dan Akses Keuangan Perbankan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta : UI
- Carpena, F., Cole, S., Shapiro, J., & Zia, B. (2011). *Unpacking the Causal Chain of Financial Literacy*. *The World Bank : Policy Research Working Paper No. 5798*
- Kurniadi, Ravli. (2022). *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia* [Skripsi]. Bogor : IPB
- Kementerian Keuangan. (2022). *Resep Atasi Ketimpangan Ekonomi*. *Media Keuangan Volume XII*(No115)
- Lee, David S. (1999). *Wage Inequality in the United States During the 1980s: Rising Dispersion or Falling Minimum Wage?*. *The Quarterly Journal of Economics* 114 (3):977-1023
- Lin, Carl & Yun, Myeong-Su, (2016). *The Effects of the Minimum Wage on Earnings Inequality: Evidence from China*. *IZA Discussion Papers* 9715
- Nopirin. (1992). *Ekonomi Moneter, Buku II, Edisi I*. Yogyakarta : BPFE
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Indonesia Desember 2022*. Jakarta: OJK

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Revisit-2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Park, Cyn-Young and Mercado, Rogelio V. (2015). *Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia. Asian Development Bank Economics Working Paper*
- RI (Republik Indonesia). (2016). Perpres No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sarma, Mandira. (2012). *Index of Financial Inclusion : A measure of financial sector inclusiveness. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development No.07/2012*.
- Shahbaz, M., Butt, S. M. dan Aamir, N. (2007). *Rural-Urban Income Inequality under Financial Development and Trade Openness in Pakistan: The Econometric Evidence. The Pakistan Development Review, 46:657-672*
- Shahbaz M, Islam F. (2011). *Financial Development and Income Inequality in Pakistan: An Application of ARDL Approach. Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*. 17:13.
- Todaro, M. P. dan S.C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (8th ed), jilid 1. Diterjemahkan oleh Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga.